

**ANALISA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO.  
226/PDT.G/2005/PN. JKT. PST TENTANG WANPRESTASI  
DALAM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI**



**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – tugas dan Syarat – syarat**

**Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Oleh :**

**SITIANA  
C 100 050 256**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2010**

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang sedang membangun. Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mencapai tujuan negara yaitu untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Tujuan negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang – undang Dasar 1945 alinea empat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia mempunyai arah dan tujuan yang jelas yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Negara Indonesia adalah negara Hukum, itulah yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-3. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan. Mengenai kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, yaitu disebutkan pada pasal 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 disebutkan bahwa ” kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Dijelaskan pula dalam pasal 31 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 ” Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”. Berdasarkan ketentuan pasal pasal diatas Tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Namun dalam prakteknya keadilan itu bersifat relatif, tergantung dari sisi sudut pandang mana menilai rasa keadilan tersebut. Contohnya saja perkara tentang wanprestasi dalam pembayaran klaim asuransi.

Fenomena terjadinya musibah tak terduga, bencana alam dan dampak krisis finansial global, serta rentannya kekuatan keuangan keluarga akibat meninggalnya kepala keluarga menjadi satu pertimbangan objektif tentang pentingnya asuransi. Secara fungsional, polis asuransi jiwa memberikan manfaat perlindungan keuangan bagi keluarga akibat kejadian tak terduga tersebut.

Dalam keadaan yang tidak kekal merupakan sifat alamiah yang mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan lebih dahulu secara tepat, sehingga dengan demikian keadaan tersebut tidak akan

pernah memberikan rasa pasti. Keadaan yang tidak pasti tersebut dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa yang biasanya selalu dihindari. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut risiko.<sup>1</sup>

Alasan utama orang mengadakan perjanjian asuransi jiwa karena Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang mungkin akan diderita tertanggung sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya dalam klausul asuransi.

Peralihan risiko hanya mungkin terjadi dengan mengadakan perjanjian asuransi atau pertanggungan. Dengan adanya peralihan risiko berdasarkan perjanjian tersebut, mengakibatkan adanya pergeseran beban risiko yang semula ada pada pihak calon tertanggung kepada penanggung. Sering timbul keluhan dari klien perusahaan asuransi jiwa bahwa pengajuan klaim memakan waktu yang sangat lama dan belum dibayar juga oleh perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Padahal dalam melaksanakan kegiatan usahanya perusahaan asuransi terutama asuransi jiwa yang sangat gencar mempromosikan produknya akan tetapi apabila saat menerima klaim perusahaan asuransi jiwa seolah-olah mengulur waktu dengan dalih prosedur yang memakan waktu cukup lama, investigasi kasus, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk klaim tersebut tidak lengkap dan sebagainya.

---

<sup>1</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta, Sinar Grafika:1998, Hal 2

Di Indonesia mengenai asuransi atau pertanggungan diatur dalam pasal 246 bab kesembilan tentang asuransi atau pertanggungan pada umumnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi:

"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu."

Secara khusus mengenai perasuransian diatur dalam suatu peraturan tersendiri yaitu undang – undang no. 2 tahun 1992 tentang perasuransian. Berdasarkan pasal 1 poin 1 undang – undang no. 2 tahun 1992 yang dimaksud dengan asuransi sebagai berikut :

“ Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. “

Mengenai klaim asuransi telah diatur dalam beberapa regulasi yaitu Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, redaksinya sebagai berikut :

” Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.”

Selain ketentuan diatas klaim asuransi juga diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 422/kmk.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yaitu :

Pasal 25 “ Tindakan yang dapat dikategorikan memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999, adalah tindakan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang : memperpanjang proses penyelesaian klaim dengan meminta penyerahan dokumen tertentu, yang kemudian diikuti dengan meminta penyerahan dokumen lain yang pada dasarnya berisi hal yang sama; menerapkan prosedur penyelesaian klaim yang tidak sesuai dengan praktek usaha asuransi yang berlaku umum. Tidak melakukan penyelesaian klaim yang merupakan bagian dari penutupan asuransi dengan mengaitkannya pada penyelesaian klaim yang merupakan bagian lain dari penutupan asuransi dalam 1 (satu) polis yang sama; memperlambat penunjukan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, apabila jasa Penilai Kerugian Asuransi dibutuhkan dalam proses penyelesaian klaim; atau menunda penyelesaian dan pembayaran klaim dengan mengaitkannya pada penyelesaian dan atau pembayaran klaim reasuransinya; “

Pasal 27 “ Perusahaan Asuransi harus telah membayar klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.”

Seperti halnya perkara No. 226/Pdt.G/2005/PN. Jkt. Pst Tentang Wanprestasi dalam pembayaran klaim asuransi oleh Ny. Henny Susianti (penggugat) terhadap ASURANSI Jiwa MANULIFE INDONESIA (tergugat). Klaim yang dia ajukan benar-benar dipersulit pihak tergugat, bahkan pihak tergugat menyatakan bahwa penggugat adalah tidak termasuk dalam program asuransi jiwa manulife Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam eksepsi tergugat.<sup>2</sup> Penggugat terdaftar sebagai pemegang polis asuransi jiwa milik tergugat sejak 12 Maret 2004. Dalam hal ini juga penggugat mengikutsertakan kedua putranya atas nama Deny Indra Gunawan dan Calvin dalam asuransi ini. Pada tanggal 29 Desember 2004 Penggugat jatuh sakit dan harus rawat inap serta berobat ke beberapa rumah sakit baik dalam negeri maupun luar negeri, pada tanggal 12 Januari 2005 penggugat mengajukan klaim kepada tergugat atas biaya yang dikeluarkan selama berobat ternyata klaim tersebut di tolak dua kali oleh pihak tergugat yang pertama pada tanggal 11 Februari 2005 dan yang kedua pada tanggal 21 April 2005. Dengan demikian penggugat menilai, bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi alias ingkar janji karena penggugat telah menggunakan jasa serta membayar premi sebagaimana mestinya terhadap Asuransi Manulife Indonesia Pro Life-20 dengan tambahan Hospital Benefit '99 PLAN AA 4 ( Manfaat perawatan rumah sakit '99 ) dan berhak mendapat pelayanan darurat medis 24 jam dari Global Assistanc & Healteare namun pihak tergugat enggan untuk membayar klaim asuransi yang di derita pihak penggugat . Sedangkan syarat dan ketentuan pengajuan

---

<sup>2</sup> berkas perkara No. 226/Pdt.G/2005/PN. Jkt. Pst Tentang Wanprestasi dalam pembayaran klaim asuransi

klaimnya sudah mengikuti ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam polis asuransi tersebut. Namun pihak tergugat enggan untuk membayar klaim asuransi kepada penggugat dengan berdalih bahwa klaimnya telah daluwarsa (istilah dalam asuransi Lapse). Walaupun klaim penggugat telah ditolak namun masih ada niat baik dari pengugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan dibantu jasa pengacara dari pihak penggugat. Namun ternyata tidak ada tanggapan niat baik dari pihak tergugat maka penggugat merasa dalam posisi yang dirugikan menepuh menyelesaikan perkara ini ke jalur hukum.

Hakim dalam hal ini bertindak sebagai penegak keadilan, menegakan kepatutan ( kebenaran formil ) dalam hukum, maka pertimbangan hukum sangatlah penting dalam memutuskan suatu perkara. Karena kepatutan tidak mungkin mengakibatkan suatu penyelesaian peristiwa yang memuaskan tiap-tiap orang manusia, melainkan selalu bersifat relatif , yaitu patut dalam pikiran dan perasaan orang-orang yang berkepentingan sesudah memperhatikan segala faktor-faktor yang terpakai dalam alam pikiran dan alam perasaan dari pihak-pihak yang bersangkutan dan dari pihak-pihak yang bertugas menyelesaikan peristiwa. Kebutuhan untuk memakai kepatutan dalam menyelesaikan suatu soal dalam suatu tata hukum antara lain nampak, apabila menurut suatu peraturan hukum seorang harus memenuhi suatu kewajiban untuk melaksanakan suatu hak dari pihak lain, akan tetapi dirasakan, bahwa, kalau demikianlah peraturan hukum itu dilaksanakan, maka ada keganjilan atau dengan kata lain perkataan ada hal yang tidak memuaskan



sepenuhnya. Dalam hal yang demikian ini lalu orang bilang bahwa penyelesaian soal secara ini adalah tidak pantas atau tidak patut. Disinilah pihak yang bertugas menyelesaikan suatu soal, terutama para hakim harus berani memajukan dan mementingkan faktor kepatutan dalam usaha untuk mengadakan keputusan yang betul – betul memuaskan atau sedikit-dikitnya yang mendekati kepada memuaskan itu.<sup>3</sup>

Maka hakim dalam menegakan kepatutan dalam perkara No. 226/Pdt.G/2005/PN. Jkt. Pst Tentang Wanprestasi dalam pembayaran klaim asuransi harus mendasar pada pertimbangan -pertimbangan yang berdasar pada hukum yang yang seharusnya minimal mendekati kebenaran formil. Putusan tersebut belum tentu memenuhi rasa keadilan semua pihak, maka dari itu penulis mencoba untuk menganalisis putusan tersebut secara independent berdasar pada perundang – undangan dan dokumen terkait.

**Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengakat judul “ANALISA Putusan Pengadilan Negeri No. 226/Pdt.G/2005/PN. Jkt. Pst Tentang Wanprestasi dalam pembayaran klaim asuransi**

## **B. Perumusan masalah**

Dalam hal ini pokok permasalahan yang akan dibahas antara lain :

1. Bagaimana petitum perkara gugatan klaim asuransi, dalam perkara perdata No. 226/Pdt.G/2005/PN. Jkt. Pst ?

---

<sup>3</sup> Prof. Dr. R. Wirjino Prodjodikoro, Azas – azas hukum perdata, Jakarta:P.T. BALE BANDUNG:1988

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum dari hakim dalam menentukan dikabulkannya gugatan penggugat ( tertanggung ) terhadap klaim asuransi yang diajukanya,,dalam perkara No. 226/Pdt.G/2005/PN. Jkt. Pst ?

### **C. Tujuan dan manfaat Penulisan**

#### Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dari hakim dalam menentukan dikabulkannya gugatan penggugat (tertanggung) terhadap klaim asuransi yang diajukanya, dalam perkara No. 226/Pdt.G/2005/PN. Jkt. Pst.
2. Untuk mengetahui petitum perkara gugatan klaim asuransi, dalam perkara No. 226/Pdt.G/2005/PN. Jkt. Pst.

#### Manfaat penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan kewajiban mahasiswa yang akan menyelesaikan studi tingkat akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan atau memenuhi program S1 pada Universitas Muhammadiyah Surakarta. Disamping itu merupakan bentuk sumbangan pikiran yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya dibidang ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan putusan dalam sengketa asuransi.

Manfaat penulisan skripsi ini adalah untuk menambah lmu pengetahuan hukum yang selama ini diperoleh, menjadi satu bentuk tulisan yang memberi ciri tersendiri sebagai seorang calon sarjana hukum. Akan tetapi penulis juga menyadari bahwa dalam membahas permasalahan dalam ilmu pengetahuan,

waktu and hal-hal lainnya, sehingga menjadikan kewajiban penulis untuk memperbaiki dan menyempurnakan di kemudian hari.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara kerja yang digunakan untuk mengumpulkan data dari objek yang menjadi sasaran penelitian. Adapun yang menjadi objek sasaran penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut :

##### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah ”terbatas” pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti

##### **2. Spesifikasi Penelitian**

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu :

- a. Petitum perkara gugatan klaim asuransi, dalam perkara perdata No. 226/Pdt.G/2005/PN. Jkt. Pst.
- b. Pertimbangan hukum dari hakim dalam menentukan dikabulkanya gugatan penggugat ( tertanggung ) terhadap klaim asuransi yang diajukanya,.dalam perkara No. 226/Pdt.G/2005/PN. Jkt. Pst.

### **3. Sumber dan Jenis Data**

Data Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang berupa :

Putusan Pengadilan Negeri No. 226/Pdt.G/2005/PN. Jkt. Pst Tentang Wanprestasi dalam pembayaran klaim asuransi maupun perundangan – undangan serta dokumen terkait.

### **4. Metode Analisis Data**

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memenuhi kerangka penulisan yang sesuai dengan prosedur penulisan maka skripsi yang akan ditulis penulis akan dibahas dalam empat pokok

bahasan yang tersusun dalam tiap-tiap bab. Tiap-tiap pokok bahasan mengandung sub-sub pokok bahasan sebagai berikut:

**Bab 1 Pendahuluan, yaitu terdiri dari.**

- A. Latar belakang masalah.
- B. Perumusan masalah.
- C. Tujuan dan manfaat Penulisan
- D. Metode penelitian.
- E. Sistematika penulisan.

**Bab II Landasan Teori, yaitu terdiri dari :**

- A. Tinjauan umum tentang Perjanjian
  - 1. Pengertian Perjanjian
  - 2. Syarat syahnya Perjanjian
  - 3. Objek Perjanjian
  - 4. Asas-asas dalam perjanjian
  - 5. Wanprestasi dan akibat hukumnya
  - 6. Overmacht dan akibat hukumnya
- B. Tinjauan umum asuransi
  - 1. Pengertian asuransi
  - 2. Pengertian para pihak dalam perjanjian asuransi
  - 3. Objek dalam perjanjian asuransi
  - 4. Pengertian risiko dalam asuransi

5. Asas asuransi
  6. Hak dan kewajiban dari penanggung dan tertanggung
  7. Pengertian premi asuransi
  8. Pengertian polis asuransi
  9. Pengertian klaim asuransi
  10. Wanprestasi dalam perjanjian asuransi
  11. Overmacht dalam perjanjian asuransi
- C. Tinjauan umum mengenai putusan pengadilan
1. Pengertian putusan pengadilan
  2. Jenis putusan pengadilan
- D. Tinjauan umum tentang pertimbangan hukum dari hakim

### **BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

- A. Petitum perkara gugatan klaim asuransi, dalam perkara perdata No. 226/Pdt.G/2005/PN. Jkt. Pst.
- B. Pertimbangan hukum dari hakim dalam menentukan dikabulkannya gugatan penggugat ( tertanggung ) terhadap klaim asuransi yang diajukanya,.dalam perkara No. 226/Pdt.G/2005/PN. Jkt. Pst.

### **BAB IV : Penutup**

- A. Kesimpulan
- B. Saran